TINJAUAN HUKUM TERHADAP VIRUS KORONA, PEMECATAN PEGAWAI DAN KORUPSI

Ditulis Oleh:
Yida Sekti Purnomo, Pesmin Alvanis

Abstract

Pandemi korona kian menebar ancaman yang mengganggu stabilitas negara-negara yang ada di dunia. Indonesia termasuk yang kena dampak besar karena banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi korban. Hal ini dapat berakibat pada timbulnya masalah serius yang menerpa paling setiap bidang kehidupan. Diantaranya yakni banyaknya perusahaan yang libur sebab ada larangan bekerja yang dibuat oleh pemerintah. Keadaan ini bisa “dimanfaatkan” oleh pengusaha yang kebetulan tidak suka dengan pegawai sehingga pegawai dipecat. Kalau ini terjadi, maka melanggar undang-undang bahkan pengusaha tersebut bisa dihukum seberat-beratnya karena melakukan tindakan tersebut pada saat sedang darurat. Keadaan darurat ini juga bisa digunakan oleh banyak pihak untuk melakukan kegiatan korupsi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pemerintah pusat Republik Indonesia telah membolehkan pemerintah daerah atau instansi untuk menggunakan sebagian dana dalam upaya melawan penyakit tersebut. oleh sebab itu menurut penulis situasi ini dapat dicegah ketika ada hukum khusus yang bisa memonitoring, mengevaluasi, memberi hukuman terhadap pemanfaatan keadaan seperti ini. Tentunya hukum khusus ini dibuat menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Kata Kunci: Korupsi, Pemecatan Pegawai, Virus.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

Telaumbanua, Dalinama. 2020. “Restriktif
Status Dewan Pengawas KPK.” Jurnal
Education and Development. vol. 8,
no. 1
Telaumbanua, Dalinama. 2018.
“Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.” Jurnal Education
and Development. vol. 4, no. 1
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. "Kumpulan Undang-undang KPK Dalam Satu Naskah." LawArXiv. November 29. doi:10.31228/osf.io/ysju2.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia." QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama. vol. 12, no. 1
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish.
- Philipus M. Hadjon, 2010, *Kontrak dengan Pemerintah ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Asministrasi*, Seminar Nasional Kontrak Kerja Jasa Konstruksi.
- Widjaja, Gunawan, 2006. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326075745-532-486933/hati-hati-dana-penanganan-wabah-corona-rawan-korupsi>
- <https://news.detik.com/berita/d-4958994/ketua-dprd-dki-anggaran-formula-e-bisa-untuk-penanganan-corona>
- <https://katadata.co.id/berita/2020/03/30/pemerintah-pusat-minta-daerah-fokuskan-dak-fisik-untuk-tangani-corona>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/tag4606/pemutusan-hubungan-kerja-phk>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200327165713-4-148039/ganasnya-corona-hampir-100-kamar-hotel-di-bali-kosong>
- <https://katadata.co.id/tags/phk-karyawan>